

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Metode | Teori | Hasil penelitian |
|----|----------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 1. | Rani Eka Diansari | ANALISA IMPLEME NTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) KASUS SELURUH DESA DI KECAMAT AN KLEDUNG KABUPAT EN TEMANGG UNG | Metode Penelitian kualitatif | Akuntabilitas Sistem Pengelolaan | Dalam proses perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 13 desa di wilayah Kecamatan Kledung telah dilaksanakan secara partisipatif oleh masyarakat desa, hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya anggota masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam acara Musrenbangdes. |

| | | | | | |
|----|------------------|--|------------------------------------|-------------------|---|
| | | TAHUN 2013 | | | |
| 2. | Agus Subroto | AKUNTAB ILITAS PENGELO LAAN DANA DESA | Metode Penelitian Kualitatif | Teori Aksi | Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes. |
| 3. | Siti Khoiriah | ANALISIS SISTEM | Metode Penelitian | Teori Keuangan | Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah |

| | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|------|---|
| | *, Utia Meylina | PENGELO LAAN DANA DESA BERDASA RKAN REGULASI KEUANGA N DESA | Kualitatif | Desa | cukup signifikan terkait dana desa diantaranya: Undang- Undang Desa, dan delapan peraturan lain yang terkait langsung dengan dana desa. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur terkait dengan system pengawasan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Inspektorat Daerah akan berperan penting sebagai pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sementara di tingkat pusat, BPK dan Badan Pengawasan Keuangan |
|--|--------------------|---|------------|------|---|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara acak. |
|--|--|--|--|--|---|

2.2. Konsep Teori

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Fullan pengertian implementasi adalah suatu proses penempatan dalam kegiatan praktek tentang ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi semua orang untuk mencapai suatu perubahan.¹ Yang dimaksud rangkaian kebijakan mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan sesuai interpretasi dari kebijakan awal, menyiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan sesuai kebijakan dan diimplementasikan melalui sarana dan prasarana yang ditunjang dengan sumber daya keuangan dan adanya pemimpin yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan sedikit penjabaran diatas setiap pandangan para ahli bahwasannya proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku dari pemegang administratif saja, namun yang

¹ Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandung: Interes Media, 2014), hlm.6

bertanggung jawab diberi tugas untuk melaksanakan program yang memunculkan kedisiplinan pada diri setiap kelompok sasaran dan juga menyangkut kekuatan politik, ekonomi, sosial yang dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk berpacu pada satu arah supaya tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Syukur dan Surmayadi implementasi memiliki 3 unsur penting, meliputi adanya kebijakan yang harus dilaksanakan, target yang dituju yaitu kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dan menerima manfaat dari program yang dijalankan pemerintah menuju perubahan, unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Menurut Grindle, implementasi adalah suatu proses tidak secara umum berupa administratif yang diteliti melalui tingkat program tertentu.² Sedangkan menurut Van Meter dan Horn bahwasannya implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang ditujukan kepada penerima kebijakan dengan dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi, dan juga variabel -

² Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

variabel tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya demi terwujudnya dengan baik.³

- Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Pendekatan Merilee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni⁴ : dilihat dari prosesnya yaitu dengan mempertanyakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan dengan merujuk dalam kebijakan, dilihat tujuan kebijakan yang tercapai yang meliputi dampak pada masyarakat secara individu maupun kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.

2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, isi kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup :

a. *Interest Affected* (Kepentingan yang Mempengaruhi): berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

³ Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. Hal 49

⁴ Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. Hal 35

Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat) : Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Misalnya, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.

c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai) : Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.

d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan) : Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Program Implementer (Pelaksana Program) : Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

f. *Resources Committed* (Sumber Daya yang Digunakan) : Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Merilee S. Grindle bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental⁵. Variabel kebijakan ini mencakup kepentingan kelompok sasaran atau target group yang termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang diterima oleh target group⁶. Pemerintah mengharapkan perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan melalui bantuan kepada masyarakat miskin dan kesesuaian letak program. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

⁵ Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press.

⁶ eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptumpp-gdl-haryatikam, hari kamis Tanggal 8 Januari 2020 Jam 16.30

2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

2.3. Definisi Konseptual

2.3.1. Implementasi

Implementasi secara umum ialah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dan dirancang dengan matang, cermat dan juga terperinci. Dengan kata lain, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Selain penjelasan secara umum diatas, para ahli dan pakar memiliki pandangan yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu implementasi. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁷. Selain itu, implementasi juga dapat diartikan sebuah penerapan. Penerapan yang dimaksud ialah menerapkan ide-ide atau gagasan yang sudah direncanakan dan harus sesuai kebutuhan penerapan itu sendiri.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online

Maknanya sebelum melakukan implementasi juga harus paham apa dampak yang terjadi setelahnya.

2.3.2. Prioritas

Prioritas sendiri memiliki kata dasar “prior” yang berarti ‘dasar’ atau ‘yang utama’. “Oxford dictionary”⁸ mengartikan istilah prioritas sebagai keadaan dimana seseorang atau sesuatu dianggap atau diperlakukan.

Prioritas juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dapat kita selesaikan dengan cepat dan menyisakan waktu yang cukup untuk mengerjakan hal yang lainnya. Adapula yang mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang dapat menunggu.

Bila membicarakan tentang prioritas, tentu kita sering mendengar tentang skala prioritas. Skala prioritas diartikan sebagai tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar atau seberapa penting suatu hal harus dilakukan. Secara umum skala prioritas dibedakan menjadi beberapa kategori. Selain skala prioritas, dikenal juga istilah prioritas masalah, yakni penentuan sejauh mana suatu masalah dianggap penting dan tidak teratasi.

2.3.3. Pemerintahan

Pemerintah ialah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang jelas dan juga mempunyai wilayah yang ada batasannya. Di Indonesia sendiri pemerintah terdiri dari berbagai tingkatan dari mulai Desa sampai

⁸ Oxford English Dictionary (online)

pusat. Untuk Pemerintah Desa sendiri di kepalai oleh Kades (Kepala Desa) akan tetapi pimpinan Pemerintahan tetap pada Pemerintah Pusat. Dalam Fungsi instrumental, pemerintah menjabarkan perundangundangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatankegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu⁹.

Pemerintah desa adalah orang-orang yang bertugas mengatur sekaligus melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat desa. Dengan Kepala Desa sebagai kepalanya, dibantu dengan Perangkat Desa. Mereka bertugas dan berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Intinya yang disebut pemerintah desa yaitu yang melaksanakan pemerintahan di desa. Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (PemDes) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁰. Yang isinya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat. Pemerintahan desa dilaksanakan atas dua faktor inti. Yaitu: faktor asal-usul dan faktor adat istiadat. Keduanya diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi di mata hukum, perangkat desa yang bertugas dalam pemerintahan desa dianggap sah dan legal. Atas dasar kategori tersebut, maka diantaranya dibentuk organisasi (birokrasi) public dengan fungsi dan tugas (misi) untuk melayani dan

⁹ H. Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung, AIPI Bandung. Hal 86

¹⁰ stianto, "*Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009), h.2

melindungi kepentingan publik¹¹. Pada akhirnya, pengertian pemerintahan desa maka bisa dikatakan bahwa pemerintahan desa yaitu proses menjalankan tugas dari perangkat desa, yang terdiri atas beberapa bagian.

Pemerintah juga mempunyai rintangan ataupun masalah-masalah yang nantinya akan mengganggu kinerja pemerintahan itu sendiri. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah ialah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik¹².

2.3.4. Dana Desa

Konsistensi pemerintah dalam komitmen terhadap pembangunan ialah dengan adanya peraturan tentang dana desa, tiap tahunnya pemerintah memberikan dana desa yang semakin tinggi. Dana tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas atau juga mutu desa dengan adanya peningkatan sarana dan infrastruktur pembangunan desa, yang mana akan mensejahterakan masyarakat di desa itu.

Adanya dana desa ke setiap desa yang ada di Indonesia, merupakan suatu bentuk penerapan terkait Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan bertujuan untuk memberikan bantuan atas adanya

¹¹ stianto, "*Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009)

¹² H. Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung, APII Bandung. Hal 13

desa-desanya di seluruh tanah air ini, dan juga menunjukkan status dan kedudukan dalam pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa¹³. Pengertian dana desa ialah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola di desa tersebut dari pemerintah pusat, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dengan jumlah yang diterima cukup lumayan. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara terkendali dan konsisten. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana desa yang disalurkan secara umum kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa, membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa, dan serta mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan menekankan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat khususnya di desa semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri dan juga masyarakatnya,

¹³ Undang Undang No 6 Tahun 2014, pasal 7

dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa tersebut dapat dirasakan secara langsung ataupun jangka panjang oleh masyarakat desa tersebut.

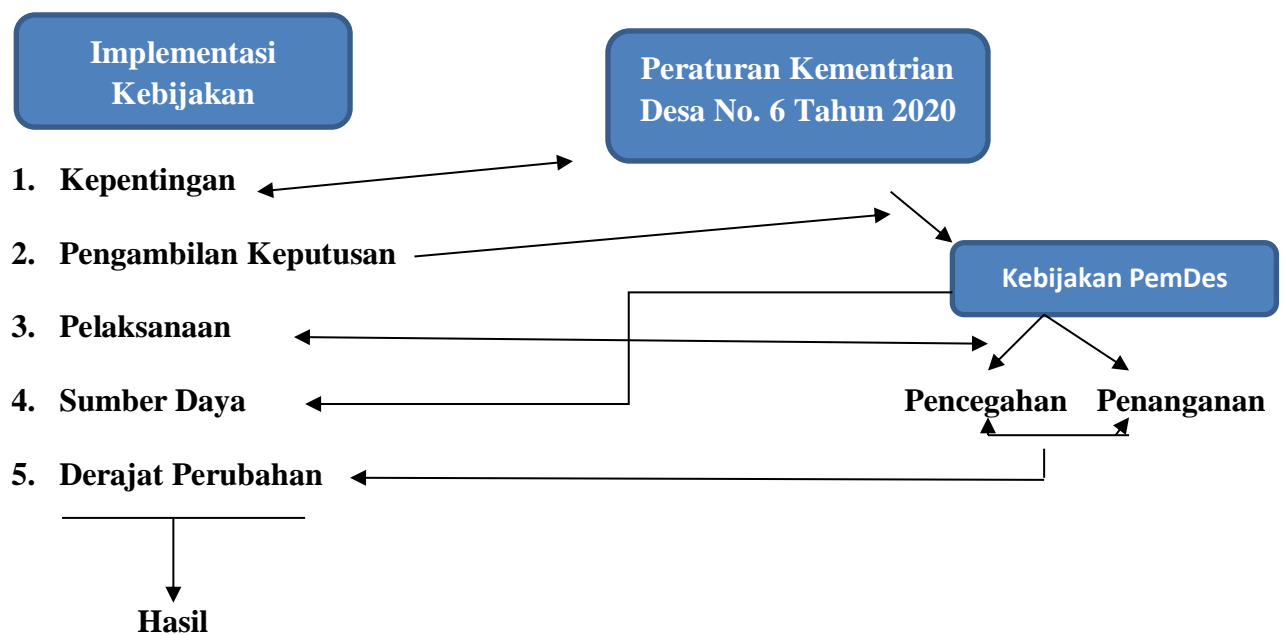
Pada pemberian dana desa di tahun 2015 sangat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mereka dapat merasakan dampaknya secara langsung, masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tersebut dan juga mengatasi masalah ketimpangan dalam desa tersebut. Manfaat pemberian dana desa ini sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa, berbagai aspek ekonomi menjadi lebih terkendali dan terpenuhi. Dan juga pembangunan infrastruktur di desa-desa tertinggal dapat dibangun dengan masif dan beberapa potensi desa dapat diarahkan dan dikembangkan dengan baik agar mengurangi berbagai ketimpangan yang ada di desa tersebut. Berbagai permasalahan yang ada di desa sedikit demi sedikit banyak yang teratasi, penyaluran dana yang dilakukan juga merata dan adil.

Akan tetapi pada tahun 2020 ini ada sedikit perubahan terkait prioritas dana desa, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia tanpa terkecuali Indonesia juga. Hal ini mempengaruhi prioritas penggunaan dana desa. Dana desa yang semula diperuntukan untuk pembangunan desa secara menyeluruh kini berubah untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, dana desa pada tahun 2020 ini juga diperuntukan untuk masyarakat yang

terkena imbas pandemi ini baik secara langsung maupun tidak¹⁴. Dengan mengalokasikan dana desa minimal 25% sampai 35% dari dana desa tahun 2020 ini untuk membantu masyarakat yang terkena imbas dari pandemi ini.

2.4. Kerangka berpikir

Bagan 2.1.
Implementasi Permendes di desa Jambeyan



¹⁴ Permendes No 6 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa

